



## **OPTIMALISASI SMART MARITIME DIPLOMACY GUNA MENDUKUNG KEAMANAN MARITIM INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA**

**Tarjuki**

Sekolah Staf dan Komando TNI AL

**Abstrak**

Perwujudan Poros Maritim Dunia sebagai konsep geopolitik yang dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo di forum Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur (East Asia Summit/EAS) ke-9, tidak bisa lepas dari aspek keamanan maritim sebagai bagian dari keamanan nasional dalam rangka menjaga kepentingan nasional yang merujuk pada tindakan preventif dan responsif dari ancaman terhadap keamanan maupun tindak pelanggaran hukum lainnya. melalui metode pendekatan deduktif dan deskriptif dengan analisis SWOT dalam mewujudkan hal tersebut, diperlukan smart maritime diplomacy guna menciptakan dan menjamin keamanan maritim di Indonesia di kawasan global dan regional dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Artikel ini akan mengulas tentang pentingnya kekuatan dan kapabilitas TNI AL sebagai salah satu alat diplomasi maritim yang mampu melaksanakan smart maritime diplomacy guna menjamin keamanan maritim khususnya dikawasan Laut Cina Selatan. Meningkatkan kerjasama bidang keamanan dengan negara lain dalam bidang keamanan (soft maritime diplomacy) dan pengembangan kemampuan alutsista TNI AL (hard maritime diplomacy).

**Kata Kunci:** Poros Maritim dunia, Smart maritime Diplomacy, Keamanan Maritim, TNI AL.

## **PENDAHULUAN**

UNCLOS 1982 merupakan Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang pertama kali menyatakan secara resmi adanya negara kepulauan yang berhak atas perairan laut yang ada diantara pulau-pulau yang dimiliki negara tersebut. Negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di posisi geostrategis dunia yang kaya dan memiliki beragam potensi sumber daya alam kelautan serta kepentingan maritimnya memiliki daya tarik bagi dunia internasional dari sektor kemaritiman. Dengan dikeluarkannya UNCLOS 1982 ini, maka Indonesia secara sah diakui dunia internasional sebagai negara kepulauan dengan ketentuan bahwa Indonesia diizinkan untuk menentukan Alur Laut Kepulauan yang melintasi Perairan Indonesia sebagai jalur pelayaran internasional.

Dengan disahkannya ALKI, maka Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan dan keselamatan bagi pelayaran dan kegiatan perdagangan internasional yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian dunia yang terlihat dengan banyaknya armada kapal yang berlayar melalui Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok di samping keberadaan ALKI ini dapat menjadi potensi ancaman bagi kedaulatan NKRI itu sendiri dari kepentingan negara lain (Nainggolan, 2016). Berdasarkan hal tersebut, sektor maritim memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan dan keamanan dalam Poros Maritim Dunia (PMD).

Untuk mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia diperlukan sinergisitas antar *stakeholder* terkait sehingga akan berkontribusi pada tumbuhnya kepedulian yang tinggi terhadap masalah kemaritiman. Formula yang diharapkan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan kemaritiman berupa pelanggaran wilayah laut dan lain-lain dengan

melakukan kerja sama antar negara yang mempunyai visi dan misi yang sama, perlunya penerapan strategi diplomasi maritim baik *soft maritime diplomacy* dan *hard maritime diplomacy* agar bisa berperan aktif dimasa damai dan menyiapkan dalam kondisi krisis sebagai bentuk eksistensi suatu negara guna menjaga keamanan maritim dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

## **METODE PENELITIAN**

Tujuan dari penulisan ini adalah memberikan pandangan dan pemahaman dalam menganalisa *smart maritime diplomacy* guna mendukung keamanan maritim Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan menggunakan teori *maritime diplomacy* dan teori keamanan maritim dihadapkan pada perkembangan lingkungan startegis guna merumuskan kebijakan dan selanjutnya dianalisis menggunakan SWOT untuk menyusun strategis pemecahan masalah yang ada.

Untuk menganalisa *smart maritime diplomacy*, maka penulis menggunakan metode deduktif dan deskriptif serta analisa SWOT dari fakta-fakta maupun kegiatan *smart maritime diplomacy* dengan pendekatan studi literatur dan kepustakaan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. SWOT mengasumsikan kekuatan (Pembangunan kekuatan TNI, anggaran); dan kelemahan (kemampuan alutsista, program dan implementasi) berasal dari internal sedangkan peluang (perkuatan industri pertahanan, kebijakan politik LN); dan ancaman (pelanggaran wilayah, kehadiran kekuatan negara asing) adalah hal eksternal yang mempengaruhi dengan empat parameter yakni (Wardoyo, 2011).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Diplomasi maritim merupakan segala aktivitas hubungan Internasional,

Nasional dan Regional yang menyangkut tentang pelayaran dan perniagaan, perdagangan yang berhubungan dengan kelautan atau disebut pelayaran niaga, sehingga dapat disimpulkan bahwa diplomasi maritim adalah hubungan kerjasama tentang terminologi kelautan dan maritim berkenaan dengan laut, yang berhubungan dengan pelayaran, dan perdagangan di laut (Simela, 2014). Penanganan keamanan maritim dalam ide Poros Maritim Dunia masih belum dapat dikatakan ideal karena terlalu memperhatikan aspek ekonomi dan masih belum lengkapnya elemen-elemen pendukung kebijakan maritim Indonesia. Mengingat keamanan maritim sebagai parameter keberhasilan dari sebuah pemerintahan negara yang berorientasi pada maritim.

Teori keamanan maritim menurut Christian Bueger dalam artikelnya berjudul *Defining Maritime Security*, keamanan maritim sebagai konsep yang mengacu pada keamanan domain maritim atau sebagai serangkaian kebijakan, peraturan, tindakan dan operasi untuk mengamankan domain maritim yang ada. Dengan mengembangkan visi geopolitik dan geostrategi di dalam konsep keamanan maritim, yang secara langsung atau tidak langsung mengarahkan tercapainya tujuan dari kebijakan luar negeri dan keamanan sebuah negara melalui domain maritim (Jurnal Christian, 2015).

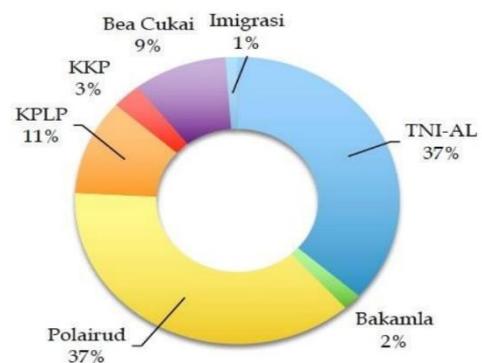
**a. Smart Maritime Diplomacy Saat Ini dan Permasalahannya**

Diplomasi maritim merupakan instrumen penting dalam bentuk pelaksanaan politik luar negeri berupa negosiasi atau perundingan yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi kelautan guna memenuhi kepentingan nasional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di lingkup nasional maupun internasional dan dapat diartikan sebagai sebuah

diplomasi maritim. Diplomasi maritim dalam bentuk *smart maritime diplomacy*. *Smart maritime diplomacy* tidak dimaksudkan untuk menyebabkan perang, melainkan untuk memberikan isyarat kepada suatu negara akan maksud dari kebijakan maritim serta kemampuan pertahanan maritim suatu negara yang tidak hanya terkait dengan berbagai aspek kelautan pada tingkat bilateral, regional dan global tetapi juga yang menggunakan aset kelautan nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan nasional dan hukum internasional (Kemhan, 2017).

1) Kebijakan Pemerintah.

Saat ini dalam pelaksanaan diplomasi maritim yang melibatkan beberapa kementerian dan lembaga dimana pelaksanaannya dilakukan oleh aktor seperti dalam gambar 1 sebagai berikut:



**Gambar 1. Komposisi Armada Patroli Maritim Indonesia**

Sumber: Bakamla.go.id

Melihat gambar 3.1 diatas dapat diketahui jumlah komposisi armada yang melaksanakan patroli dalam rangka peran diplomasi guna membangun keamanan maritim Indonesia khususnya TNI AL. Secara empirik, kebijakan *Employment* kekuatan TNI AL di luar yurisdiksi nasional selama ini hanya mengatur tentang penggunaan kekuatan TNI AL dalam melaksanakan misi perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB),

seperti yang telah dilakukan oleh Kontingen Garuda Indonesia di Libanon. Sedangkan, kebijakan nasional tentang penggunaan kekuatan TNI AL di luar yurisdiksi nasional yang operasionalnya bukan dibawah bendera PBB belum ada regulasinya. Kebijakan nasional berupa keputusan politik penggunaan kekuatan TNI AL di luar yurisdiksi nasional masih bersifat insidental dan belum didukung dengan landasan hukum nasional yang memadai. Kurangnya regulasi terkait penentuan penanganan pelanggaran wilayah secara tegas yang dilakukan oleh kapal ikan, *Costguard*, kapal perang maupun pesawat tempur negara lain yang kerap memasuki wilayah yurisdiksi dan berujung pada tindak pelanggaran laut.

## 2) Kemampuan Alutsista TNI

Peningkatan kekuatan militer Tiongkok secara masif di Laut Cina Selatan sejak 2011 yang tujuannya adalah untuk menjaga keamanan di kawasan tersebut selama beberapa tahun belakangan juga meningkatkan sikap asertif untuk mendukung klaim batas wilayah, maka Pemerintah RI saat ini merasa perlu untuk memprioritaskan pembangunan sarana pendukung bagi penempatan kekuatan militer yang dianggap cukup kuat untuk menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menjaga keamanan maritim.

Jumlah peralatan pertahanan terutama alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang terbatas dan kemampuan peralatan yang rata-rata tidak sesuai dengan perkembangan teknologi. Sehingga pada saat ini kekuatan alutsista TNI AL masih berada pada kekuatan *Green Water Navy*, artinya hanya mampu mengamankan perairan sampai batas ZEE. Selain itu, Industri pertahanan nasional khususnya Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) sampai saat ini masih mengandalkan bahan baku dari luar negeri dan mempunyai kecenderungan

pengelolaan perusahaan yang belum efisien sehingga hasil yang dicapai merupakan alutsista berbiaya tinggi (*high cost*).

## b. *Smart Maritime Diplomacy* yang Di Harapkan

Ken Booth menyebutkan bahwa AL di dunia memiliki peran universal yaitu (Marsetio, 2016): Pertama, peran Militer (*Military Role*) adalah penggunaan kekuatan militer untuk memenangkan perang atau konflik bersenjata dalam rangka menegakkan kedaulatan negara di laut dengan cara pertahanan negara dan penangkalan. Kedua, peran Polisionil (*Constabulary Role*) yang dilaksanakan untuk menegakan hukum nasional dan hukum Internasional di laut. Ketiga, peran Diplomasi (*Diplomacy Role*) merupakan sebuah sarana untuk "*show of force*" guna memberikan efek penggentar bagi lawan atau bakal lawan sehingga akan mampu mengurungkan niat mereka untuk mengancam terhadap kedaulatan dan keamanan di wilayah NKRI. Adapun implementasi dari *smart maritime diplomacy* yang diharapkan yaitu:

1) kepercayaan negara lain terhadap keamanan maritim.

Penggunaan *Maritime Diplomacy* tidak hanya untuk mengelola konflik dan ketegangan antar negara terkait permasalahan maritim melalui penyusunan instrumen hukum internasional, tetapi juga merupakan penggunaan aset atau sumber daya dalam domain maritim untuk mengatur hubungan antar negara yang di kategorikan ke dalam tiga bentuk, yaitu (Miere, 2014): *Co-operative maritime diplomacy* meliputi keterlibatan berbagai aktor dalam berbagai aktivitas dengan negara lain yang mensyaratkan kerja sama antar aktor dalam menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan aspek kemaritiman, meliputi pertukaran personel, program pendidikan,

pertemuan kolaboratif, dan lainnya yang bertujuan untuk *confidence-building*.

Kedua yaitu *Persuasive maritime diplomacy* Bertujuan untuk meningkatkan pengakuan negara atau pihak lain terhadap kekuatan nasional yang dimiliki oleh suatu negara sekaligus membangun wibawa negara dalam sistem internasional menggunakan *showing the flag* dengan maksud mengerahkan komponen kekuatan maritim dengan mengibarkan bendera sebagai penanda eksistensi negara di wilayah kedaulatan maritimnya.

Ketiga yaitu *Coersive maritime diplomacy* atau disebut juga dengan diplomasi kapal meriam (*gunboat diplomacy*). Penggunaan instrumen kekuatan militer atau *maritime forces* untuk mengamankan kepentingan nasional suatu negara di perairan. Negara melalui militernya akan melakukan penembakan, penyerangan, penyergapan, dan lainnya terhadap setiap pihak yang dipandang melakukan pelanggaran di teritorial lautnya.

2) Sinergisitas elemen-elemen pemerintah dalam diplomasi maritim.

Sinergisitas dari kekuatan AL, *Coastguard*, Industri Maritim merupakan cerminan dari rasa senasib sebagai bangsa dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara Indonesia. Dengan sinergisitas, diharapkan akan dapat meningkatkan peran diplomasi maritim dalam kancah kegiatan negara-negara di kawasan regional dan internasional, mulai dari yang bertujuan keamanan lingkungan (*environmental security*), kemanusiaan (*disaster relief*), *search and rescue* (SAR), *peace-operations*, *damage control*, melalui mekanisme kunjungan/muhibah, pertukaran perwira, *Navy To Navy Talk* (NTNT), pameran bendera, *naval presence*, latihan bersama dan pameran kekuatan.

3) Kesiapan alutsista dan sarana pendukung kesiapan alutsista.

Adapun kondisi yang diharapkan adalah peningkatan jumlah dan kondisi Alutsista TNI AL khususnya kapal kombatan sesuai dengan pembangunan dalam rencana MEF. TNI Angkatan Laut sebagai efek gentar (*deterrent effect*) dalam mendukung peran diplomasi maritim di bidang keamanan maritim diharapkan pemerintah memprioritaskan pembangunan alutsista dan sarana prasarana bagi penempatan kekuatan militer yang dianggap cukup kuat untuk menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menjaga keamanan maritim. Dalam hal ini fokus kepada pembangunan adalah Peningkatan Kemampuan Alutsista dan Mengoptimalkan Infrastruktur pendukung pertahanan.

Keamanan maritim menurut Christian Bueger dalam artikelnya berjudul *Defining Maritime Security*, keamanan maritim sebagai konsep yang mengacu pada keamanan domain maritim atau sebagai serangkaian kebijakan, peraturan, tindakan dan operasi untuk mengamankan domain maritim yang ada. Dengan mengembangkan visi geopolitik dan geostrategi di dalam konsep keamanan maritim, yang secara langsung atau tidak langsung mengarahkan tercapainya tujuan dari kebijakan luar negeri dan keamanan sebuah negara melalui domain maritim (Jurnal Christian, 2015).

berdasarkan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, maka dirumuskan kebijakan sebagai pedoman dalam upaya pemecahan permasalahan yang terkait dengan optimalisasi *smart maritime diplomacy* guna mendukung keamanan maritim Indonesia sebagai poros maritim dunia, sebagai berikut: **“Terwujudnya optimalisasi *smart maritime diplomacy* melalui perumusan kebijakan Pemerintah dan peningkatan Alutsista yang**

**dimiliki oleh TNI AL guna mendukung keamanan maritim Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia”**

Berdasarkan analisis peluang, kendala, kekuatan dan kelemahan, selanjutnya dilaksanakan analisis SWOT serta disusunnya strategi dan upaya dalam menyelesaikan pokok permasalahan, antara lain:

a. Strategi-1

Mengoptimalkan *smart maritime diplomacy* guna mendukung keamanan maritim Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan pembangunan kekuatan TNI melalui perkuatan industri pertahanan dan meningkatkan anggaran pertahanan serta kebijakan luar negeri guna mencegah terjadinya pelanggaran wilayah di perairan Indonesia.

Adapun upaya-upaya guna mendukung Strategi-1, yaitu:

- 1) TNI AL merumuskan kembali kebijakan berupa regulasi *Operational requirement* dalam pembangunan alutsista TNI AL yang dipercayakan kepada Srena Kasal, Disadal dalam pembangunan KRI/KAL dari segi jumlah dan kualitas oleh industri perkapalan dalam negeri.
- 2) Mabes TNI AL melaksanakan koordinasi dengan Mabes TNI dan Kemenhan untuk mewujudkan kemandirian Industri Pertahanan Nasional (Indhannas) yang berkemampuan maju, mandiri dan berdaya saing dengan negara lain dibutuhkan kerja sama, kebijakan pemerintah dan keterpaduan semua *stakeholder* termasuk perangkat regulasinya sebagai payung hukum dalam bentuk perundang-undangan tentang industri pertahanan

nasional. Perkembangan industri pertahanan nasional diharapkan untuk mendapatkan kemandirian pertahanan, mengurangi ketergantungan luar negeri dengan berupaya *transfer of technology* dari negara produsen.

- 3) Pembentukan *Border Committee* antara Indonesia dan negara-negara yang berbatasan langsung dengan perairan Indonesia berfokus di perbatasan laut. Diadakan *Border Committee* diantara beberapa negara dengan melibatkan elemen-elemen perbatasan yang secara garis besar terdiri dari sub komite patroli perbatasan, sub komite komunikasi, Sub komite Intelijen dan sub komite lintas batas dengan mempertegas garis perbatasan wilayah peroraan Indonesia melalui forum dan diskusi.

b. Strategi-2.

Mengoptimalkan *smart maritime diplomacy* guna mendukung keamanan maritim Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan peningkatan kemampuan alutsista TNI AL melalui perkuatan industri pertahanan dan peningkatan program dan implementasi untuk memaksimalkan *smart maritime diplomacy* untuk mencegah kehadiran kekuatan maritim negara asing di perairan Indonesia. Adapun upaya-upaya guna mendukung Strategi-2, yaitu:

- 1) Mabes TNI AL dalam hal ini Dismatal melaksanakan program peremajaan kekuatan unsur-unsur KRI yang ada melalui pelaksanaan program Pemeliharaan Tingkat Depo (Hardepo), Pemeliharaan Tingkat

Menengah (Harmen) dan *Mid Life Modernization (MLM)* untuk meningkatkan kondisi teknis kapal-kapal yang dimiliki oleh TNI AL khususnya yang berusia di atas 25 tahun agar mampu mendukung pelaksanaan tugas operasi dalam rangka menjaga stabilitas keamanan maritim wilayah perbatasan.

- 2) TNI AL ikut menyusun Formula dalam berkoordinasi antar instansi, kementerian/Lembaga kemaritiman yang terkait dengan berbagai regulasi yang mengatur peran dan tugas masing-masing aktor melalui penegasan kembali wewenang, fungsi dan batas wilayah kewenangan.

## KESIMPULAN

- a. Melatarbelakangi kepentingan-kepentingan yang menjadi alasan terwujudnya suatu diplomasi maritim, merupakan pelaksanaan politik luar negeri yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi kelautan guna memenuhi kepentingan nasional sesuai dengan wilayah kemaritiman dalam mendukung kebijakan Poros Maritim Dunia melalui *Smart maritime diplomacy* dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dengan menyusun kebijakan dan strategi melalui analisa menggunakan SWOT.
- b. Kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan *Smart maritime diplomacy* dengan menyusun dan menentukan upaya-upaya

yang dibutuhkan untuk mendukung strategis yang sudah ada yaitu pembangunan KRI/KAL, Pembentukan *Border Committee* antara Indonesia dan negara-negara tetangga, mewujudkan kemandirian industri nasional, program peremajaan kekuatan unsur-unsur KRI yang ada melalui pelaksanaan program Pemeliharaan Tingkat Depo (Hardepo), Pemeliharaan Tingkat Menengah (Harmen) dan *Mid Life Modernization (MLM)*.

## DAFTAR PUSTAKA

Simela Victor Muhamad. (2014). *Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia. Info Singkat Hubungan Internasional*, Vol. VI, No. 21.

Roell. Peter, et.al. (2013). *Maritime Security : Perspective for A Comprehensive Approach*. ISPSW No 222 2 dalam jurnal ISPSW *Strategies Series: Focus on Defense and International Security*. No. 222.

Jurnal Christian Bueger (2015). *What Is Maritime Security?*. (Wales Uk: Cardiff University Press), 3

Supandi, Ade. (2018). *Pembangunan Kekuatan Tni Al Dalam Rangka Mendukung Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*. Jurnal Pertahanan & Bela Negara 5(2): Agustus 2018

Kemhan. (2017). *Buku Putih Kebijakan Kelautan Indonesia*”, Kemhan, Jakarta. 47.

Wardoyo, Paulus. (2011) *Enam Alat Analisis Manajemen*”. (Edisi Pertama). Semarang: Semarang University Press.

Laksamana TNI Dr. Marsetio. (2016). *Aktualisasi Peran Pengawasan Wilayah Laut Dalam Mendukung Pembangunan Indonesia Sebagai Negara Maritim yang Tangguh*”. Markas Besar AL. Diakses pada tanggal 9 Juli 2021. <http://fri2016.uny.ac.id/sites/fri2016.uny.ac.id/files/5A2.%20MAKALAH%20%20DR.%20MARS%20ETIO.pdf>

**Tarjuki**

*Optimalisasi Smart Maritime Diplomacy Guna Mendukung Keamanan Maritim Indonesia .....(Hal 754-761)*

Miere, Christian Le. (2014). *Maritime Diplomacy in the 21st Century: Drivers and Challenges*. (New York: Routledge, 2014), 8-15

Nainggolan, Poltak Partogi. (2016). *Indonesia dan Ancaman Keamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)*. Jurnal DPR RI. Kajian Vol. 20 No. 3 183-200.